

**LAMPIRAN**

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KUTAI KARTANEGARA TENTANG KESEPAKATAN BERSAMA  
ATAS PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2026  
NOMOR : 170/SK-24/DPRD/11/2025  
NOMOR : /SKB/HK/2025  
TANGGAL : 28 November 2025

| NO | JUDUL   | MATERI   | SIFAT BARU/UBAH/CABUT | TAHUN PENYEMPAIAN KE DPRD | TAHUN PELAKSANAAN | PENGUSUL  | KETERANGAN |
|----|---|--|-----------------------|---------------------------|-------------------|-----------|------------|
| 1. | PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | PERATURAN DAERAH KANUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM SUDAH TIDAK RELEVAN DENGAN PERATURAN DIATASNYA       | BARU                  | 2025                      | 2026              | SATPOL PP |            |
| 2. | PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK  | PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK DALAM PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK   | BARU                  | 2025                      | 2026              | DPRD      |            |
| 3. | RISET DAN INOVASI DAERAH  | MENGATUR PENYELENGGARAAN RISET DAN INOVASI OLEH DAERAH, PERAN BRIDA, PENDANAAN, KEMITRAAN, SERTA PEMANFAATAN HASIL RISET UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN DAERAH. | BARU                  | 2025                      | 2026              | BRIDA     |            |

| NO | JUDUL  | MATERI   | SIFAT<br>BARU/<br>UBAH/<br>CABUT | TAHUN<br>PENYEMPAIAN<br>KE DPRD | TAHUN<br>PELAKSANAAN | PENGUSUL  | KETERANGAN |
|----|--|--|----------------------------------|---------------------------------|----------------------|---|------------|
| 4. | PERUBAHAN PERDA<br>NOMOR 7 TAHUN 2023<br>TENTANG RTRW        | TINDAK SURAT REKOMENDASI<br>DARI A.N. MENTERI AGRARIA<br>DAN TATA RUANG/KEPALA<br>BANDAN PERTANAHAN NASIONAL<br>DIREKTUR JENDERAL TATA<br>RUANG TANGGAL 11 AGUSTUS<br>2025 PERIHAL REKOMENDASI<br>ATAS PENINJAUAN KEMBALI<br>DAN REVISI PERATURAN<br>DAERAH TENTANG RENCANA<br>TATA RUANG WILAYAH (RTRW)<br>KABUPATEN KUTAI<br>KARTANEGARA | UBAH                             | 2025                            | 2026                 | DINAS<br>PERTANAHAN<br>DAN<br>PENATAAN<br>RUANG |            |
| 5. | RENCANA INDUK<br>PEMBANGUNAN<br>KEPARIWISATAAN 2026-<br>2045 | ARAH PEMBANGUNAN<br>KEPARIWISATAAN JANGKA<br>PANJANG, PENETAPAN<br>KAWASAN DAN DESTINASI<br>PRIORITAS, STRATEGI<br>PEMASARAN, PERAN<br>MASYARAKAT DAN DUNIA<br>USAHA, INFRASTRUKTUR,<br>serta MEKANISME EVALUASI<br>PENGEMBANGAN PARIWISATA  | BARU                             | 2025                            | 2026                 | DISPAR  |            |
| 6. | RENCANA PEMBANGUNAN<br>INDUSTRI KABUPATEN<br>2025-2045       | PENATAAN KAWASAN INDUSTRI<br>KABUPATEN   | BARU                             |                                 | 2026                 | DISPERINDAG                                     |            |

| NO | JUDUL   | MATERI   | SIFAT BARU/UBAH/CABUT | TAHUN PENYEMPAIAN KE DPRD | TAHUN PELAKSANAAN | PENGUSUL | KETERANGAN |
|----|---|--|-----------------------|---------------------------|-------------------|----------|------------|
| 7. | PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PERILAKU PENYIMPANGAN SEKSUAL   | MENGATUR SECARA KHUSUS PENCEGAHAN DAN PENGGULANGAN PERILAKU PENYIMPANGAN SEKSUAL TERUTAMA PADA ANAK-ANAK   | BARU                  | 2025                      | 2026              | DPRD     |            |
| 8. | PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN | PENAMBAHAN KETENTUAN HAK DAN KEWAJIBAN, PEMBERDAYAAN PEMUDA EQUALITY GENDER DAN DISABILITAS, PENGEMBANGAN KEPEMUDAAN, KWIRUSAHAAN BERBASIS EKONOMI                           | UBAH                  | 2025                      | 2026              | DPRD     |            |
| 9. | PENYELENGGARAAN URUSAN PERHUBUNGAN  | PENATAAN TRANSPORTASI DARAT DAN PERAIRAN, PERPARKIRAN, TRAYEK, KESELAMATAN, PERIZINAN, PENGAWASAN, SERTA INTEGRASI MODA TRANSPORTASI DI WILAYAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA. | BARU                  | 2025                      | 2026              | DISHUB   |            |

| NO  | JUDUL  | MATERI   | SIFAT BARU/UBAH/CABUT | TAHUN PENYEMPAIAN KE DPRD | TAHUN PELAKSANAAN | PENGUSUL | KETERANGAN |
|-----|--|--|-----------------------|---------------------------|-------------------|----------|------------|
| 10. | PERAN SERTA DUNIA USAHA DALAM KEMAJUAN DESTINASI WISATA HIBURAN DAN PARIWISATA | KETERLIBATAN PERUSAHAAN SWASTA DALAM KEMAJUAN WISATA HIBURAN DAN PARIWISATA UNTUK TERLIBAT DALAM PEMBANGUNAN   | BARU                  | 2025                      | 2026              | DPRD     |            |
| 11. | PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA           | PEMBENTUKAN, PENYESUAIAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH  | BARU                  | 2025                      | 2026              | ORTAL    |            |
| 12. | PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN KELOMPOK PEREMPUAN KEPALA KELUARGA (PEKKA)       | PENDATAAN, PERLINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEPALA KELUARGA MELALUI PENINGKATAN KAPASITAS, DUKUNGAN SOSIAL-EKONOMI, AKSES USAHA, DAN KOORDINASI LINTAS PERANGKAT DAERAH. | BARU                  | 2025                      | 2026              | DPRD     |            |
| 13. | DANA CADANGAN DAERAH   | DANA CADANGAN DAERAH YANG BERFUNGSI MENJAMIN KETERSEDIAAN DANA RELATIF BESAR YANG BERSUMBER PADA DANA CADANGAN FISKAL DENGAN KONSEP FISCAL RESERVE FUND YANG DIGUNAKAN UNTUK     | BARU                  | 2025                      | 2026              | BPKAD    |            |

| NO  | JUDUL   | MATERI   | SIFAT BARU/UBAH/CABUT | TAHUN PENYEMPAIAN KE DPRD | TAHUN PELAKSANAAN | PENGUSUL | KETERANGAN |
|-----|---|--|-----------------------|---------------------------|-------------------|----------|------------|
|     |   | KEPENTINGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENDUKUNG PROGRAM-PROGRAM STRATEGIS  |                       |                           |                   |          |            |
| 14. | PERDA TENTANG PELAKSANA UU 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP (METODE OMNIBUS) | MENGATUR PENYESUAIAN DAN HARMONISASI SELURUH PERDA YANG TERDAMPAK KUHP BARU, PENEGASAN KEWENANGAN DAERAH DALAM PENEGAKAN NORMA PIDANA TERTENTU, PENGUATAN PERAN SATPOL PP, PENATAAN SANKSI ADMINISTRATIF, SERTA KOORDINASI PENEGAKAN HUKUM AGAR REGULASI DAERAH SELARAS DENGAN KETENTUAN KUHP 2023 | BARU                  | 2025                      | 2026              | DPRD     |            |
| 15. | PERTANGGUNGJAWABAN APBD TAHUN 2025                                    | ANGGARAN   | BARU                  | 2025                      | 2026              | BUPATI   |            |
| 16. | APBD-P TAHUN 2026   | ANGGARAN   | BARU                  | 2025                      | 2026              | BUPATI   |            |
| 17. | APBD TAHUN 2027   | ANGGARAN   | BARU                  | 2025                      | 2026              | BUPATI   |            |

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

AULIA RAHMAN BASRI

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



H. AHMAD YANI